

# **REFORMASI REGULASI DI INDONESIA**

---

**Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas**

**Disampaikan dalam acara Seminar Nasional Agenda Reformasi Regulasi:  
Menata Fungsi dan Kelembagaan Sistem Perundang-Undangan Indonesia**

**Jakarta, 13 Februari 2019**



# KOMITMEN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN RR

## KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN



Melalui Paket Kebijakan Ekonomi I-XVI, sejauh ini lebih dari 204 peraturan yang dideregulasi, meliputi pencabutan, revisi dan pembentukan regulasi baru



## BAPPENAS

**SIMPLIFIKASI REGULASI (2016-2018)**, yang fokus pada bidang perizinan, investasi, tata niaga ekspor impor dan Kemudahan berusaha.

- Tahun 2016 : 324 Regulasi dicabut, 75 Regulasi direvisi.
- Tahun 2017 : 106 Regulasi dicabut, 91 Regulasi direvisi, 237 Regulasi digabung menjadi 30 Regulasi.
- Tahun 2018 : Bappenas bekerja sama dengan UPH IEALP melakukan analisis terhadap 29 Regulasi di bidang UMKM dari total 48 Regulasi yang diinventarisir

**KERANGKA REGULASI**, Menyelaraskan Kebijakan dalam dokumen Perencanaan Nasional (RPJMN dan RKP) dengan Regulasi yang akan dibentuk (termasuk penganggarannya)



## KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Pembatalan **3.143** regulasi yang terdiri atas Peraturan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri serta Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan serta menghambat perizinan investasi.



## KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

*Data base* regulasi (JDIHN dan JDIH) di Kementerian Lembaga dan Sistem Monitoring Penyusunan PP dan Perpres.





# ARAH REFORMASI REGULASI DALAM RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMN 2020-2024

TEMA



Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan

## URGENSI KERANGKA REGULASI



**Mengarahkan** proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan



Meningkatkan **efisiensi** pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi



Meningkatkan **kualitas** regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan



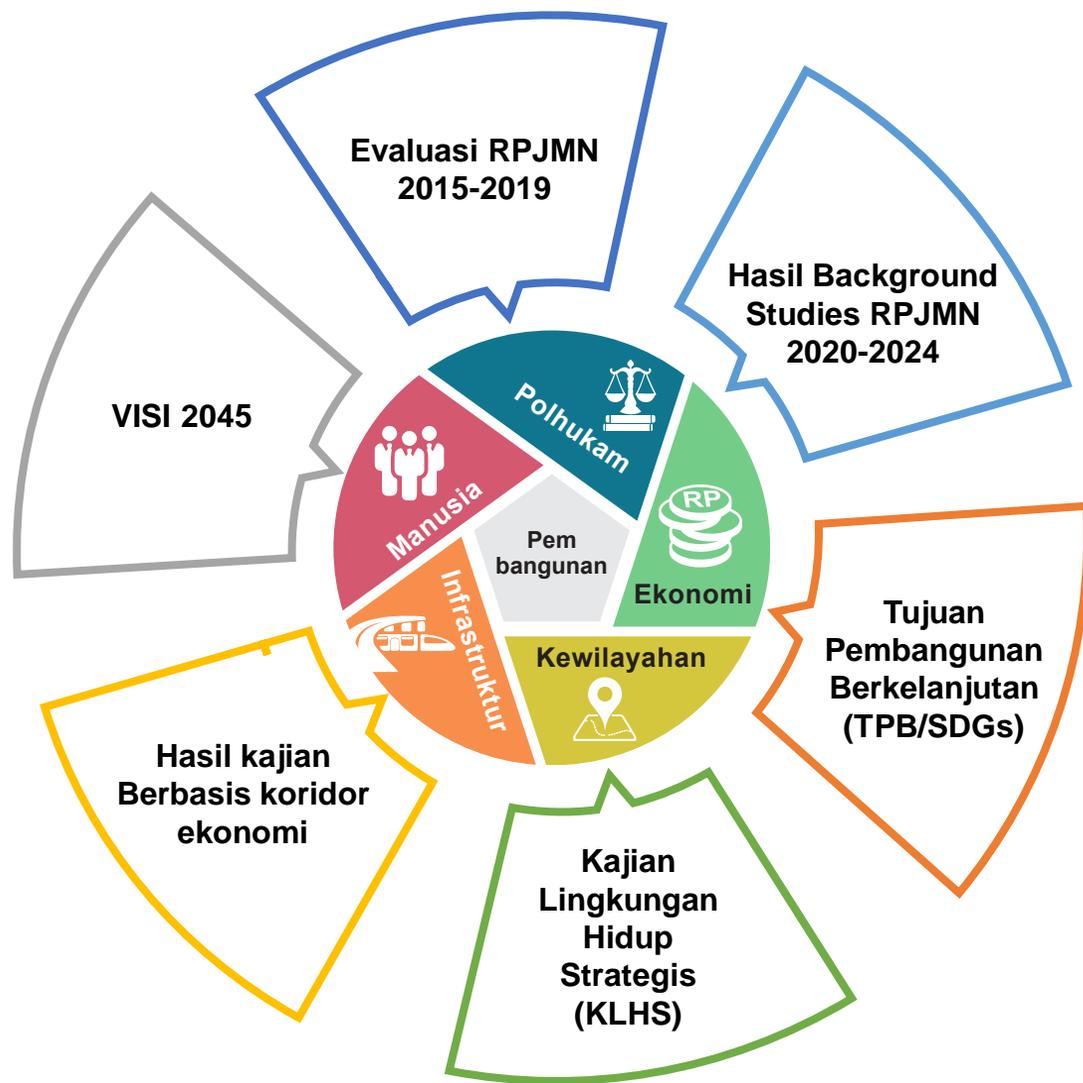
Instrumen Simplifikasi Regulasi (ISR), *Cost and Benefit Analysis (CBA)*, *Regulatory Impact Analysis (RIA)* (*Evidence Based Policy*)



Kerangka Regulasi yang tepat dan sesuai kebutuhan



# INTEGRASI INPUT-INPUT KE DALAM RPJMN 2020-2024



## Input

- Isu/Permasalahan
- Target/Sasaran (kualitatif, kuantitatif)
- Tantangan
- Arah Kebijakan



- Program Prioritas
- Kegiatan Prioritas



# UPAYA PENATAAN KELEMBAGAAN SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN





# PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN REGULASI





**TERIMA KASIH**